



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 315 TAHUN 2019  
TENTANG  
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AL-AMANAH JENEPONTO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-AMANAH  
JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Jeneponto menjadi Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto;
- b. bahwa usulan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:182/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Jeneponto menjadi Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-AMANAH JENEPONTO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-AMANAH JENEPONTO.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amanah Jeneponto menjadi Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, yang beralamat di Karisa Jalan ke Pannara Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 37211.

KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Al-Amanah Jeneponto yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 44 tanggal 27 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Yusran La Tanrang, S.H., berkedudukan di Kabupaten Jeneponto dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-6366.AH.1.04 Tahun 2012 tanggal 09 Oktober 2012.

KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fakultas dan program studi:

a. Fakultas Tarbiyah:

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
2. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana; dan
3. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana.

b. Fakultas Ekonomi Syariah:

1. Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;

c. Fakultas Syariah:

1. Program Studi Hukum Pidana Islam pada Program Sarjana; dan
2. Program Studi Hukum Tata Negara Islam pada Program Sarjana;

KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi

perguruan tinggi, wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan.

- KELIMA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN